

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang memiliki perlengkapan lebih lengkap jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya, artinya norma hukum mempunyai alat penegak apabila normanya dilanggar dan berlakunya dapat dipaksakan terhadap masyarakat.

Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada yang dalam bentuk tertulis dan ada juga yang tidak tertulis yang disebut hukum adat, di samping hukum agama dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai norma hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat di mana hukum adat itu berlaku, tentu sudah diharapkan oleh masyarakat yang akan mentaatinya.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisionilnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh Negara. Demikian pula identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dihormati sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat sendiri. Setiap daerah juga memiliki identitas tersendiri yang mewakili daerahnya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini dan banyak dikaji lebih mendalam adalah hukum adat di Bali.

Hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, meliputi sumber daya alam, pernikahan, dan lain-lain. Masyarakat adat di Bali dalam kehidupannya selalu menghendaki ada keseimbangan antara kehidupan lahir dan bathin

¹ Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009, *Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

(*sekala dan niskala*). Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilosofatan “Tri Hita Karana” yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan menderitanya “*krama adat*”.

Salah satu pelanggaran dalam hukum adat Bali adalah pencurian. Pencurian yang belakangan ini marak di Bali adalah pencurian benda sakral (*pratima*). Hal demikian memerlukan langkah pemulihan, dengan membebaskan suatu kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Konsekuensinya adalah apabila pelaku bukan warga setempat yang berdasarkan kewenangan desa adat dapat menjatuhkan sanksi, maka kewajiban tersebut akan bergeser artinya warga desa adat yang melakukan sendiri upaya pemulihan tersebut.

Tingginya frekuensi tindak pidana pencurian benda-benda sakral di satu sisi tidak dapat dilepaskan dengan keunikan serta nilai seni benda sakral sehingga menarik minat tamu manca negara untuk mengoleksinya. Di sisi lain bagi pelaku pencurian, benda-benda sakral mempunyai nilai ekonomis tinggi. Demikian juga dalam melakukan pencurian, pelaku relatif dengan mudah melakukannya karena umumnya benda-benda sakral disimpan di pura-pura atau tempat suci lain yang umumnya berlokasi agak

jauh dari pemukiman penduduk. Perbuatan ini oleh masyarakat adat di Bali, dianggap sebagai perbuatan yang berakibat tercemarnya kesucian (*leteh*), baik terhadap tempat kejadian maupun benda tersebut. Perbuatan semacam ini dianggap sebagai suatu pelecehan terhadap kehidupan beragama umat Hindu, karena benda-benda yang disucikan tersebut (umumnya dalam bentuk *pratima*) merupakan sarana dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang oleh umat Hindu diyakini mempunyai kekuatan ghaib.²

Pencurian benda-benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat, merupakan suatu delik adat, walaupun tindak pidana tersebut merupakan delik umum karena telah diatur dalam KUHP. Adanya pandangan yang menganggap pencurian benda-benda sakral sebagai delik adat, konsekuensinya adalah dalam penyelesaian kasus pun memerlukan adanya suatu penjatuhan sanksi yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan “reaksi adat” atau “pemenuhan kewajiban adat”. Reaksi adat merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam rangkaian pengembalian keseimbangan masyarakat dalam kasus-kasus delik adat, terutama yang menurut masyarakat hukum adat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan magis. Dilihat dari hukum formal pencurian benda-benda suci (sakral), seperti pencurian *pratima*, tapakan ataupun benda-benda sarana upacara keagamaan lain, tidak lebih dari kejadian kriminal biasa. Dalam pandangan masyarakat adat di Bali

² <https://queendifara.wordpress.com/sih/hukum-adat/uts/>, anonim, UTS, 29 Januari 2015.

umumnya, pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan.³ Eratnya kaitan antara hukum adat dan agama, telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven, di mana dikemukakan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat.⁴

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai tinjauan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian benda sakral, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDA SAKRAL TERKAIT DENGAN HUKUM ADAT DI MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA - BALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi adat dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali?
2. Apakah kendala atau hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan hukum adat dalam pencurian benda sakral?

³ I Gusti Ketut Ariawan, 1992, Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 135.

⁴ Van Vollenhoven, 1981, Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrech) terjemahan Koninklijk Instituut voor Tall, Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, Djambatan , Jakarta, hlm. 131.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang dapat atau tidaknya sanksi adat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan hukum adat dalam pencurian benda sakral.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tinjauan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali pada khususnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Pengadilan Negeri Negara

Sebagai bahan masukan bagi pihak Pengadilan Negeri Negara di dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat, sehingga dapat diambil suatu atau beberapa tindak lanjut yang positif dan berguna bagi keberhasilan Pengadilan Negeri Negara.

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal tinjauan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali pada khususnya.

d. Penulis

Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal tinjauan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa skripsi yang pernah ditulis dengan judul atau tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Indah Lestari, Nomor Mahasiswa: 050200271, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009. Judul skripsi Pengaturan Pelestarian Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1992 Dan Konvensi Internasional. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan pemanfaatan dan pelestarian benda – benda yang berasal dari kapal yang tenggelam di dasar laut sebagai benda cagar budaya secara nasional dan internasional?, dan bagaimana status hukum kepemilikan benda – benda yang berasal dari kapal yang tenggelam sebagai benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan dan pelestarian benda-benda yang berasal dari kapal yang tenggelam di dasar laut sebagai benda cagar budaya secara nasional dan internasional, dan untuk mengetahui status hukum kepemilikan benda – benda yang berasal dari kapal yang tenggelam sebagai benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional. Hasil penelitian yaitu ketentuan tentang pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya dari tingkat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang benda cagar budaya. Sedangkan dari tingkat internasional, yaitu: Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage dan UNCLOS 1982 pada Pasal 303 ayat (1). Perbedaan pokok

yaitu penelitian yang dilakukan Indah Lestari garis besar isinya pada benda cagar budaya, sedangkan penelitian penulis garis besar isinya pada benda sakral.

2. Tantri Lesmono, Nomor Mahasiswa: 20050610004, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009. Judul skripsi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Cagar Budaya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya? dan faktor apakah yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya. Hasil penelitian yaitu penegakan hukum tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kota Surakarta masih lemah, karena hukuman terhadap pencuri benda cagar budaya belum sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya adalah dalam proses penyidikan sulitnya obyek pembanding serta modus operasi pelaku yang profesional dan keterlambatan memberikan laporan pencurian benda cagar budaya, hambatan dalam penuntutan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap benda cagar

budaya dan kesulitan mencari saksi, hambatan dalam proses persidangan adalah undang-undang cagar budaya tidak tegas dalam menetapkan pelaku tindak pidana yang berkenaan dengan cagar budaya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Tantri Lesmono garis besar isinya pada tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya, sedangkan penelitian penulis garis besar isinya pada tindak pidana pencurian benda sakral.

3. Heri Subadi, Nomor mahasiswa: 070200441, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011. Judul skripsi Analisis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arca Di Museum. Rumusan masalahnya yaitu apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencurian arca di museum? dan bagaimana sanksi hukum terhadap pencurian arca di museum? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana pencurian arca di museum dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pencurian arca di museum. Hasil penelitian yaitu sebab terjadinya tindak pidana pencurian arca adalah faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait. Sanksi hukum terhadap pencurian arca di museum yaitu pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda, selain itu dapat diancam dengan ketentuan pencurian yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Heri Subadi garis besar isinya pada tindak pidana pencurian arca di museum,

sedangkan penelitian penulis garis besar isinya pada tindak pidana pencurian benda sakral di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini, batasan konsep mengenai Tinjauan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali adalah:

1. Pidanaan yaitu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
2. Pelaku atau *daader*⁵ yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana, artinya orang yang sengaja atau tidak sengaja telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau dengan kata lain orang yang memenuhi semua unsur-unsur delik seperti yang telah ditentukan Undang-Undang, tanpa melihat apakah perbuatan yang telah dilakukan tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena disuruh oleh pihak ketiga.
3. Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Benda sakral atau disebut juga *pratima*⁶ merupakan simbol Dewa yang digunakan sebagai alat untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa. Benda sakral secara umum berarti benda yang dianggap suci oleh seseorang

⁵ P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 594

⁶ <http://paduarsana.com/2013/01/30/pratima-dalam-hindu/>, Paduarsana, Pratima Dalam Hindu, 5 Maret 2015

atau sekelompok orang yang tempat dan penggunaannya sudah ditetapkan.

5. Hukum adat Bali⁷ adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat Bali itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai tinjauan pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

2. Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tinjauan pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 B ayat (2)

⁷ <http://koncohukum.blogspot.com/2013/01/hukum-adat-bali.html>, Anonim, Hukum Adat Bali, 5 Maret 2015.

mengenai kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionilnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh Negara dan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 I ayat (3) mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil yang dihormati sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Pasal 29 ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana Pasal 76 mengenai seseorang yang tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya atas perkara yang sama dan Bab XXII tentang Pencurian Pasal 363 mengenai ancaman hukuman pencurian dengan pemberatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap:

1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.

2) Narasumber

Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya atau keahliannya yaitu:

- a) Hakim Pengadilan Negeri Negara
- b) Tokoh adat

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian hukum ini dipergunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang tinjauan pembedaan terhadap pelaku pencurian benda

sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali dan bentuknya terbuka.

4. Metode Analisis

Data sekunder

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang tinjauan pembedaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

2) Sistematisasi hukum positif:

Secara vertikal ada sinkronisasi karena tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal ada harmonisasi, prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi hukum positif

- a) Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematisasi yaitu penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan atau dengan perundang-undangan yang lain.
- c) Interpretasi teleologis yaitu setiap norma pasti mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang tinjauan pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan.

Dokumen yang diperoleh akan dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus dalam hal ini untuk memperoleh data tentang tinjauan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab. Bab I terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.

Bab II tentang Pembahasan, terdiri atas Tinjauan Pustaka berisi A tinjauan umum pembedaan dan B tinjauan terhadap hukum pidana adat di Bali. C berisi hasil penelitian tentang Tinjauan Pembedaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat di Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali.

Bab III Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.